



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD ADAM**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **691234**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.582.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **188.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



3. MOBIL, HONDA BRIO/MINIBUS Tahun 2021, LAINNYA Rp.  
180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 83.011.749

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.853.511.749

III. HUTANG

Rp. 95.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.758.311.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.